

## KINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sidik Kurnia Sakti<sup>1</sup>, Rizki Amalia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, [rizkiamalia@ipdn.ac.id](mailto:rizkiamalia@ipdn.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan analisis Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan dimensi yang diteliti yaitu (1) Produktivitas, (2) Kualitas, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, (5) Akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut sudah terlaksana dengan cukup baik namun masih memerlukan penyempurnaan dalam dimensi kualitas dan responsivitas. Hambatan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut (1) Kurangnya tenaga penyuluh di Dinas Pangan Pertanian dan perikanan, (2) Data Jumlah Petani Rumput Laut yang belum Valid, (3) Tidak adanya industri Pemasaran rumput laut.

Upaya mengatasi hambatan kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan dalam pemberdayaan petani rumput laut Kota Tarakan yaitu: (1) Melakukan penambahan jumlah tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut, (2) Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di kota Tarakan, (3) Melakukan Bina Usaha dengan Perusahaan Domestik. Saran dari penelitian: (1) Perlunya memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga penyuluh yang baru maupun tenaga penyuluh yang sudah ada. (2) Perlunya melakukan sosialisasi kepada para petani rumput laut tentang pentingnya update data administrasi. (3) Perlunya membangun Industri pemasaran rumput laut di Kota Tarakan.

Kata Kunci: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kinerja, Pemberdayaan

### ABSTARCT

*This study aims to determine and analyze the Performance of the Department of Agriculture and Fisheries Food in empowering seaweed farmers in the City of Tarakan, North Kalimantan Province. This research uses descriptive qualitative research methods. In this study an analysis of the Performance of the The Department of Agriculture and Fisheries Food was conducted with the dimensions examined, namely (1) Productivity, (2) Quality, (3) Responsiveness, (4) Responsibility, (5) Accountability.*

*The results showed that the performance of the Department of Agriculture and Fisheries Food in empowering seaweed farmers was done quite well but still needed perfection in Efforts to overcome the performance barriers of The Department of Agriculture and Fisheries Food in empowering seaweed farmers in Tarakan City are: (1) Increase the number of extension workers for seaweed farmers, (2) Update data on the number of seaweed farmers in the city of Tarakan, (3) Doing Business Development with Domestic Companies. Suggestions from the study: (1) The need to provide training to all new*

**\*Corresponding author**

Sidik Kurnia Sakti  
Institut Pemerintahan dalam Negeri  
[sidikkurniasakti21@gmail.com](mailto:sidikkurniasakti21@gmail.com)

Received: October 15, 2020  
Revised: November 3, 2020  
Accepted: December 10, 2020  
Available Online: December 30, 2020

*extension workers and existing extension workers. (2) The need to conduct socialization to seaweed farmers about the importance of updating administrative data. (3) The need to build a seaweed marketing industry in Tarakan City.*

*Keywords: The Department of Agriculture and Fisheries Food, Performane, Empowerment*

## **PENDAHULUAN**

Berangkat dari sejarah merdekanya bangsa Indonesia yang telah di proklamirkan 75 tahun yang lalu, ada beberapa tujuan negara yang harus dicapai. Satu diantaranya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan suatu keinginan dan arah bangsa Indonesia untuk dapat mengayomi masyarakat, mewujudkan ketentraman dan memperoleh masyarakat yang berpendidikan serta turut dalam menjaga keamanan secara menyeluruh. Pemerintah tentunya mempunyai peranan yang penting mulai sebagai perencana, penggerak, dan juga melakukan pengawasan dalam pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan (Silalahi dan Syafri 2015:13).

Semenjak berlakunya aturan yang menjelaskan tentang pengelolaan pemerintahan di daerah yang ditujukan untuk mendorong terciptanya ketentraman masyarakat dengan cara pengembangan layanan, penguatan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan kemampuan untuk bersaing dengan wilayah yang lain melalui cara selalu mencermati dasar demokrasi, kesetaraan dan rasa adil bagi setiap wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah mempunyai kemandirian yang seluas-luasnya untuk mengelola wilayahnya. Maksud dari hal ini adalah untuk mendorong terciptanya ketentraman masyarakat dan pembangunan nasional.

Segala potensi yang tersimpan di negara ini sudah semestinya dapat diberdayakan dengan baik, termasuk juga dengan sumber daya alamnya. Sekitar 70 (tujuh puluh) persen wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Pesisir wilayah Indonesia mempunyai bermacam kehidupan laut, keanekaragaman flora dan fauna yang hidup, tumbuh dan berkembang didalamnya. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Indonesia baik secara nasional maupun daerah semuanya sangat potensial untuk dikembangkan. Termasuk halnya dengan pemberdayaan masyarakat yang membudidayakan sumber daya alam yang ada.

Kota Tarakan dulunya merupakan kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah. Kota Tarakan di resmikan pada tanggal 15 Desember 1997. Luas wilayah Kota Tarakan secara keseluruhan  $\pm 657,33$  km<sup>2</sup> yang terdiri atas  $\pm 250,80$  km<sup>2</sup> wilayah daratan dan  $\pm 406,33$  km<sup>2</sup> wilayah perairan. Bisa diartikan bahwa  $\pm 61,8$  % wilayah Kota Tarakan merupakan perairan. Serta dengan lokasi Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil dan dikelilingi dengan lautan, dapat dipastikan bahwa Laut Tarakan menyimpan berbagai peluang untuk memiliki

kapasitas ikan yang lebih banyak baik itu ikan yang berasal dari laut ataupun tepi laut. Dengan adanya kondisi seperti ini, menyebabkan Kota Tarakan memiliki peluang untuk peningkatan kapasitas di bidang perikanan menjadi sumber pendapatan masyarakatnya.

Satu diantara produk perikanan unggul yang dimiliki oleh Kota Tarakan yaitu rumput laut selain ikan, udang, dan kepiting. Potensi rumput laut Kota Tarakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Produksi rumput laut di Kota Tarakan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penghasilan rumput laut basah dan produksi rumput laut kering terlihat pula di tahun 2018 dalam setiap bulannya.

**Tabel 1.1**  
**Data Produksi Rumput Laut Kering**  
**Kota Tarakan Tahun 2018**

<b>DATA PRODUKSI RUMPUT LAUT KERING</b>		
<b>KOTA TARAKAN TAHUN 2019</b>		
<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Produksi</b>
		<b>Kg</b>
1	Januari	1,112,650
2	Pebruari	1,069,200
3	Maret	1,583,560
4	April	1,120,350
5	Mei	1,005,184
6	Juni	1,087,242
7	Juli	1,245,090
8	Agustus	1,812,637
	Jumlah	<b>10,035,914</b>

*Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2019*

**Tabel 1.2**  
**Data Produksi Rumput Laut Basah**  
**Kota Tarakan Tahun 2018**

<b>DATA PRODUKSI RUMPUT LAUT BASAH</b>		
<b>KOTA TARAKAN TAHUN 2019</b>		
<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Produksi</b>
		<b>Kg</b>
1	Januari	7,788,550
2	Pebruari	7,484,400
3	Maret	11,084,920
4	April	7,842,450
5	Mei	7,036,291
6	Juni	7,610,695
7	Juli	8,715,630
8	Agustus	12,688,460
	<b>Jumlah</b>	<b>70,251,397</b>

*Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2019*

Berdasarkan kedua tabel di atas, terjadi peningkatan penghasilan kota Tarakan dalam setiap bulannya terutama pada bulan agustus yang mencapai jumlah 1.812.637 Kg pada produksi rumput laut kering dan untuk rumput laut basah menghasilkan 12.688.460 Kg. Dengan meningkatnya penghasilan produk tersebut, pemerintah juga turut andil dalam memberikan dukungan kepada petani rumput laut sehingga peningkatan peran petani rumput laut merupakan satu diantara hal utama yang penting untuk dilakukan. Namun, dibalik berbagai potensi tersebut Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan masih menghadapi permasalahan, yaitu belum adanya data yang valid terkait dengan total petani rumput laut yang berada pada Kota Tarakan sehingga dukungan yang diberikan oleh pemerintah baik itu berupa penyuluhan, pelatihan, dan juga bantuan dirasakan belum merata. Berikut daftar kelompok petani rumput laut yang mendapatkan bantuan.

**Tabel 1.3**  
**Daftar Kelompok Petani Rumput Laut Penerima Bantuan**  
**Tahun 2018-2019**

No.	NAMA POKDAKAN	ALAMAT	NAMA KETUA	JENIS BUDIDAYA	TOTAL ANGGOTA	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pokdakan Matahari Biru	RT 16 Karang Rejo	Amiruddin	Budidaya Rumput Laut	10	
2	Pokdakan Tani Harapanku	Lingkas Ujung Rt. 8 RW. 4	Wahyudin	Budidaya Rumput Laut	16	
3	Pokdakan Bina Sejahtera	Jl. Binalatung RT. 09 Pantai Amal	H. Syarifuddin	Budidaya Rumput Laut	27	
4	Pokdakan Sirannuang	Jl. Binalatung RT. 15 Pantai Amal	Abd. Rahman	Budidaya Rumput Laut	25	
5	Pokdakan Pada Idi	Jl. Binalatung RT. 09 Pantai Amal	Jumali	Budidaya Rumput Laut	20	
6	Pokdakan Cahaya Amal	Jl. Binalatung RT. 07 Pantai Amal	Mansyur	Budidaya Rumput Laut	19	
7	Pokdakan Amal Indah	Jl. Binalatung RT. 08 Pantai Amal	Kamaruddin	Budidaya Rumput Laut	16	
8	Pokdakan Tunas Mekar	Jl. Binalatung RT. 11 Pantai Amal	Siran T	Budidaya Rumput Laut	10	
9	Pokdakan Sinar Amal Abadi	Jl. Binalatung Rt. 10 Pantai Amal	Acong	Budidaya Rumput Laut	17	
10	Pokdakan Sinar Bunga Laut	Jl. Binalatung RT.15	Hendy	Budidaya Rumput Laut	19	
11	Pokdakan Tunas Sejahtera	Jl. Binalatung RT. 15 Pantai Amal	Nurmansyah	Budidaya Rumput Laut	20	
12	Pokdakan Bina Maju	Jl. Binalatung RT. 11 Pantai Amal	Jufri	Budidaya Rumput Laut	17	
13	Pokdakan Tani Nelayan Bina Bahari	Jembatan Besi RT. X1 RW. 11 Lingkas Ujung	M. Hatta B	Budidaya Rumput Laut	10	
14	Pokdakan Mekar Indah	Jl. Binalatung RT. 10 Pantai Amal	Jastiar Jamil	Budidaya Rumput Laut	10	
15	Pokdakan Bina Lestari	Jl. Binalatung RT. 12 Pantai Amal	Burhanuddin	Budidaya Rumput Laut	10	
16	Pokdakan Usaha Bersama Jaya	Jl. Binalatung Sungai Kulit RT.11 Kel. Pantai Amal	Syamsuddin	Budidaya Rumput Laut	12	
17	Pokdakan Maju Bersama Abadi	Jl. Binalatung Sungai Kulit RT.11 Kel. Pantai Amal	Adi	Budidaya Rumput Laut	13	
18	Pokdakan Harapan Kita	Jl. Binalatung RT.07 Kel. Pantai Amal	Irianto Laji	Budidaya Rumput Laut	13	
19	Pokdakan Nelayan Bersatu	Jl. Binalatung RT. 10 Kel. Pantai Amal	Sutomo	Budidaya Rumput Laut	18	

Sumber: Dinas Pangan, Pertenian dan Perikanan, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, hanya 19 kelompok saja yang terdaftar dan yang hanya mendapatkan bantuan, sehingga dukungan yang diberikan pemerintah diberikan kepada petani rumput laut yang terdaftar. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan belum adanya pemerataan bantuan yang diberikan kepada petani rumput laut. Masih ada sebagian petani rumput laut yang belum mendapatkan bantuan disebabkan karena tidak terdaftar.

Selain itu juga masih sulitnya melakukan pemasaran produk rumput laut. Permasalahan ini dikarenakan tidak adanya perusahaan yang dapat mengelola rumput laut di kota Tarakan, sehingga sampai dengan saat ini rumput laut tersebut hanya dijual dalam bentuk mentah bukan dalam bentuk olahan industri. Para petani rumput laut hanya dapat menjual hasil panen rumput laut kepada konsumen tanpa adanya pengolahan-pengolahan yang dilakukan terlebih dahulu. Belum tersedianya industri yang mengelola rumput laut di Kota Tarakan mengakibatkan terbentuknya rumah produksi yang hanya untuk menjual hasil panen kepada konsumen.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
2. Apakah yang menjadi hambatan kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. KINERJA ORGANISASI**

Kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan dan visi serta tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai

target organisasi yang tercantum dalam visi organisasi. Kinerja organisasi lebih berorientasi kepada pencapaian yang telah diperoleh melalui tugas pokok fungsi yang dimilikinya.

Menurut Sholeh dan Suripto (2011:3) menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang sebelumnya telah tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Sementara itu, Bernardin dan Russel (dalam Sedarmayanti 2017:283) menjelaskan bahwa “*performance is defined as the record of outcomes produced on a specified time period*”. Maksudnya, kinerja merupakan hasil apa yang dikeluarkan (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan merupakan kontribusi dari individu pegawai kepada organisasi mereka.

Selanjutnya menurut Dwiyanto (2008:47) “kinerja organisasi adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya”. Lebih lanjut, Dwiyanto (2008:50-51), merumuskan lima dimensi kinerja organisasi pemerintah, yakni:

1. Produktivitas, merupakan konsep yang mengukur tentang tingkat efektivitas dan efisiensi, input dan output dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai target organisasi.
2. Kualitas, pelayanan merupakan suatu pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
3. Responsivitas, merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menyikapi suatu perubahan dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, merupakan suatu penjelasan tentang pengukuran kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan dengan prinsip administrasi yang benar dan sesuai kebutuhan organisasi tersebut,
5. Akuntabilitas, merupakan suatu parameter yang menunjukkan seberapa besar kebijakan/program/kegiatan/ organisasi tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas disini juga menunjukkan kesesuaian penyelenggaraan kebijakan/program/kegiatan/ dengan peraturan yang berlaku.

## **2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Usaha yang dilakukan untuk menjadikan seseorang baik individu maupun kelompok agar memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu dapat disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Menurut Fachrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### 3. MASYARAKAT PESISIR

Masyarakat yang berada atau yang seluruh kegiatan perekonomiannya bergantung pada ekosistem laut dapat dikategorikan sebagai masyarakat pesisir. Terkadang masyarakat pesisir (*Costal Community*) juga diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, biasanya berupa perahu dengan sistem ekonomi yang hirarki seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2005:143).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan memperkuat kelembagaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan efektivitas dan sinergi program pemberdayaan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal, meningkatkan kerjasama lintas agama, suku, ras, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan antar pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan



Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Pemberdayaan kelompok warga yang tinggal di tepi pantai menjadi urusan daerah. Hal ini pula lah yang menjadi dasar atau landasan bahwasannya pemberdayaan masyarakat mejadi salah satu perhatian bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, disebutkan dalam penjelasan terkait masyarakat pesisir dalam bab ini menjadi penting dikarenakan petani rumput laut merupakan salah satu profesi dari masyarakat pesisir yang memanfaatkan sumber daya kelautan yang tersedia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini, penulis memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (dalam Herdiansyah 2014:8) bahwa; *“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on district methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analize words, report detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting”*. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses kegiatan meneliti yang bersifat keilmuan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dalam defenisi kemasyarakatan dengan mewujudkan potret umum dan lengkap, mengungkapkan pemikiran secara rinci dari petunjuk asal, serta dilaksanakan dalam pengaturan yang murni tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Kemudian Penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mendapatkan keterangan yang diperlukan. Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang ditemukan selama proses penelitian, namun bukan untuk mengetahui kebenarannya dari suatu fenomena yang telah terjadi di lapangan. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono (2012:1) yang mengatakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Selanjutnya metode deskriptif menurut Nazir (2014:43) adalah “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 KINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Berdasarkan data dan hasil penelitian, Penulis mencoba menjelaskan fokus yang diamati dengan pedoman pada teori serta membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi, yaitu:

#### **A. Produktivitas**

Produktivitas dalam penelitian ini memiliki arti kegiatan untuk menghasilkan, yang umumnya dimaknai dengan kegiatan perbandingan antara masukan dan keluaran. Kegiatan menghasilkan secara efisien tersebut dilakukan oleh Dinas Pangan, pertanian dan perikanan melalui pemberdayaan petani rumput laut dalam menghasilkan rumput laut yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada, untuk pencapaian Dinas Pangan, pertanian dan perikanan dalam memproduksi rumput laut melalui pemberdayaan para petani rumput laut mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2. Dalam kedua tabel tersebut, terlihat terjadi peningkatan penghasilan kota Tarakan dalam setiap bulannya terutama pada bulan agustus yang mencapai jumlah 1.812.637 Kg pada produksi rumput laut kering dan untuk rumput laut basah menghasilkan 12.688.460 Kg.

Proses produksi para petani rumput laut terlaksana secara teratur karena dibantu dengan kemampuan yang terdapat pada daerah-daerah para petani rumput laut dalam memproduksi rumput laut dan juga bantuan sumber daya yang diperoleh untuk menunjang proses produksi rumput laut.

#### **B. Kualitas**

Permasalahan tentang kualitas pelayanan pada saat ini lebih mengarah kepada arti hasil kerja sebuah lembaga pemerintah. Kepuasan warga dalam pelayanan yang diberikan menjadi ukuran hasil kerja lembaga pemerintah.

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini memiliki arti seperti diberikannya fasilitas yang mudah, kecekatan, keterampilan, perilaku tenaga penyuluh yang menyenangkan dalam memberikan layanan.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan perikanan masih belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dalam memberikan informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi para petani rumput laut di Kota Tarakan. Belum

optimalnya situasi ini terjadi karena Dinas Pangan, pertanian dan perikanan kekurangan tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut.

Sebelumnya Dinas Pangan, Pertanian dan perikanan memiliki website yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan seperti para pedagang, petani hingga nelayan. Dinas Pangan, pertanian dan perikanan mempunyai website yang di kelola sendiri, namun sekarang website tersebut telah dilebur karena sudah tidak ada yang mengelola dan sekarang di pusatkan di Kominfo, sehingga untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus datang langsung ke kantor dan menemui bidang yang ingin dimintai informasi.

Di samping itu, Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dari beberapa informan bahwa Pemberian pelayanan berupa pemberian bantuan juga belum dirasakan optimal dikarenakan tidak semua petani mendapatkan bantuan. Hanya petani rumput laut yang terdaftar saja yang memperoleh bantuan dan untuk petani yang tidak terdaftar, tentunya tidak mendapatkan bantuan. Adapun daftar kelompok petani rumput laut yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada tabel 1.3. Dengan adanya kondisi seperti ini mengakibatkan pelayanan terhadap apa yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat terutama petani rumput laut menjadi belum merata.

### **C. Responsivitas**

Responsivitas merupakan suatu proses bagaimana organisasi dapat memahami keperluan publik, merancang rencana dan pengutamaan layanan serta memajukan rencana layanan kepada masyarakat yang cocok dengan keperluan dan pendapat publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, sampai dengan saat ini di Kota Tarakan belum memiliki Koperasi Unit Desa dan industri yang berskala regional, sehingga petani rumput laut selalu tergantung pada pengumpul lokal. Permasalahan lainnya adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan industri yang bisa melakukan perdagangan secara tepat dan berkelanjutan. Permasalahan ini merupakan masalah paling utama yang menjadi kendala bagi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan untuk membantu petani rumput laut dalam menawarkan usahanya.

Pada saat ini, petani rumput laut sudah menjual rumput lautnya ke pengumpul dan setelah itu diperdagangkan lagi ke industri yang berada di Surabaya, Makassar dan Jakarta kemudian barulah dikirim untuk diperdagangkan ke luar wilayah lainnya baik dari dalam dan luar negeri. Petani rumput laut atau pembudidaya rumput laut hanya mengandalkan hasil produksi rumput lautnya kepada pengepul. Tidak ada alternatif lain bagi petani rumput laut

untuk mengembangkan pemasaran rumput lautnya. Berikut tabel data pemasaran rumput laut kering kota tarakan tahun 2019.

**Tabel 1.4**  
**Data Pemasaran Rumput Laut Kering**  
**Kota Tarakan Tahun 2019**

<b>DATA PEMASARAN RUMPUT LAUT KERING KOTA TARAKAN</b>				
<b>TAHUN 2019</b>				
<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Domestik</b>	<b>Ekspor</b>	<b>Tujuan</b>
		<b>Kg</b>	<b>Kg</b>	
1	Januari	1,011,500	-	Domestik : Makasar, Bali, Jakarta & Surabaya, Harga Rata-rata Rp. 14.000,-
2	Pebruari	972,000	-	
3	Maret	1,439,600	-	
4	April	1,018,500	-	
5	Mei	913,804	-	
6	Juni	988,402	-	
7	Juli	1,131,900	-	
8	Agustus	1,647,852	-	
<b>Jumlah</b>		<b>9.123.558</b>	<b>-</b>	
<b>Nilai</b>		<b>127.729.812.000,00</b>		

*Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2019*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa data pemasaran rumput laut yang kering di Kota Tarakan mencapai 9.123.558 kg dengan nilai penjualan yaitu Rp 127.729.812.000 di tahun 2019. Dalam pemasaran rumput laut tersebut, Pemerintahan Kota Tarakan melakukan kerjasama dengan perusahaan domestik yang berada di Makassar, Jakarta, dan Surabaya dalam pemasaran dengan nominal berkisar Rp.14.000,-. Hal ini dilakukan karena Kota Tarakan belum memiliki Koperasi Unit Desa dan industri yang berskala regional.

#### **D. Responsibilitas**

Responsibilitas mengartikan seberapa besar penerapan aktivitas sebuah instansi berdasarkan asas-asas administrasi secara benar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah

ditetapkan. Semakin kegiatan organisasi dijalankan berdasarkan asas administrasi dan aturan yang berlaku, maka semakin efektif hasil kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan sudah menjalankan kewenangannya berdasarkan apa yang telah menjadi ketentuan berupa pelaksanaan renstra yang ada. Hal ini terlihat dari program kerja yang tertuang di dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2019, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- c. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
- d. Program peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- e. Program pengembangan budidaya perikanan;
- f. Program pengembangan perikanan tangkap;
- g. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi perikanan;
- h. Program pengembangan kawasan perikanan; dan
- i. Program peningkatan dan pengembangan produksi perikanan.

## **E. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu wujud dari pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk adanya pelaporan yang dilakukan. Semua kewajiban itu dilaporkan dengan cara berkala melewati suatu media.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis saat melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa kegiatan pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah kota Tarakan dan masyarakat secara periodik telah dilaksanakan. Pelaporan dibuat dalam bentuk buku laporan tahunan dengan mencantumkan data secara tertulis.

Dari beberapa analisis di atas, dapat diketahui bahwa Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa hambatan, antara lain dalam dimensi kualitas dan responsivitas.

## **1.2 HAMBATAN KINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

### **A. Kurangnya tenaga penyuluh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.**

Dalam dimensi kualitas, dapat diketahui bahwa salah satu parameternya adalah tenaga penyuluh yang menyenangkan dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan hanya memiliki tenaga penyuluh yang berjumlah 3 (tiga) orang. Ketiga orang tenaga penyuluh ini mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kepada petani rumput laut. Tenaga penyuluh sangat penting dalam pemberdayaan petani rumput laut agar dapat mencapai produksi yang baik.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan cukup kesulitan dalam memberikan penyuluhan secara maksimal kepada petani rumput laut dikarenakan minimnya tenaga penyuluh sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pemberian wawasan dalam pengembangan rumput laut kepada para petani rumput laut di kota Tarakan.

Keterbatasan tenaga penyuluh menjadi beban tersendiri dalam menjalankan pembinaan yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang dengan perbandingan jumlah petani rumput laut yang akan dibimbing dan tergabung dalam Pokdakan yang berjumlah 19 (sembilan belas) Pokdakan.

### **B. Data jumlah petani rumput laut yang belum valid**

Berbagai macam bukti berbentuk angka dan tulisan yang ditemukan dalam observasi terhadap sebuah fenomena yang terjadi dapat diartikan sebagai data. Data sangat diperlukan sebagai sebuah informasi yang dapat dipahami oleh siapa saja yang membutuhkannya. Oleh karena itu data mengenai jumlah petani rumput laut sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Dalam dimensi kualitas, disebutkan bahwa diperlukan pula kecekatan, keterampilan dari tenaga penyuluh memberikan pelayanan dalam hal menginventarisir data petani rumput laut. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis saat melakukan penelitian dapat diketahui bahwa data jumlah petani rumput laut yang terdaftar berbeda dengan data yang ada di lapangan, sehingga data menjadi belum valid. Hal ini disebabkan karena masih banyak petani rumput laut yang belum terdaftar dan belum tergabung dalam kelompok. Selain itu terdapat petani rumput laut yang bukan penduduk kota Tarakan, melainkan pendatang dari luar kota Tarakan.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan masih kurang melakukan sosialisasi sehingga masih banyak petani rumput laut yang belum tahu informasi tentang pentingnya menjadi anggota kelompok dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Dengan meningkatnya petani rumput laut di Kota Tarakan mengakibatkan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sulit untuk menyalurkan subsidi secara adil, apalagi subsidi kepada petani rumput laut yang tidak masuk dalam daftar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan diketahui bahwa petani rumput laut yang diberi bantuan hanya kepada petani-petani yang membentuk kelompok dan terdaftar di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, sementara itu bagi petani rumput laut yang tidak terdaftar, maka mereka tidak mendapatkan bantuan yang ada.

### **C. Tidak adanya industri pemasaran rumput laut.**

Industri Pemasaran merupakan suatu tempat yang dijadikan wadah untuk pertukaran produk dengan pelanggan dalam pasar produksi, yang bertujuan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Dengan adanya industri pemasaran akan mempermudah segala bentuk kegiatan jual beli barang produksi rumput laut.

Dalam dimensi responsivitas, dapat diketahui bahwa Kota Tarakan belum memiliki Koperasi Unit Desa dan industri yang berskala regional, sehingga petani rumput laut selalu tergantung pada pengumpul lokal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mengalami Kesulitan untuk mencari perusahaan atau industri yang mampu melakukan pemasaran berupa ekspor langsung dari Tarakan.

Hal ini menjadi masalah paling utama yang menghambat kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam membantu petani rumput laut untuk mengembangkan jalan masuk ke perdagangan domestik dengan tujuan mempermudah para petani rumput laut untuk menjual rumput lautnya.

## **1.3 UPAYA MENGATASI HAMBATANKINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

### **A. Melakukan penambah tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut.**

Penambahan tenaga penyuluh merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penambahan tenaga penyuluh akan membantu untuk memperoleh produktivitas yang lebih baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya tenaga penyuluh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan adalah melakukan penambahan tenaga penyuluh dengan cara melakukan rekrutmen tenaga penyuluh.

## **B. Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di Kota Tarakan.**

Update data merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada terkait data administrasi tentang nama dan jumlah petani rumput laut di Kota Tarakan. Dengan akuratnya data administrasi tentang data seluruh petani rumput laut yang ada di kota Tarakan, maka akan memperjelas jumlah yang ada dan mempermudah dalam memberikan bantuan. Disamping itu, dengan adanya data administrasi yang akurat diharapkan petani rumput laut yang ada pada kota Tarakan untuk taat administrasi sehingga apa yang dibutuhkan dapat dipenuhi.

Update data dilakukan dengan cara melakukan pendataan kembali sehingga seluruh petani rumput laut yang belum terdaftar namanya di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat terdaftar dan dapat membuat suatu kelompok pembudidaya ikan atau yang biasa dikenal dengan Pokdakan. Pembentukan kelompok ini juga bertujuan agar dalam pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana dapat tersalurkan secara merata dan menyeluruh.

## **C. Melakukan bina usaha dengan perusahaan domestik**

Usaha yang dilaksanakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam mengatasi ketidakadaan industri pemasaran rumput laut adalah dengan melakukan bina usaha dengan perusahaan domestik dalam rangka pemasaran rumput laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan bina usaha dengan perusahaan domestik yaitu dengan cara melakukan kerja sama dengan perusahaan domestik untuk meningkatkan produksi rumput laut di kota Tarakan. Hal ini di karenakan belum adanya industri pemasaran rumput laut di Kota Tarakan.

Kondisi yang ada, hasil budidaya petani rumput laut selalu bergantung kepada pengumpul yang membeli langsung rumput laut mereka. Keadaan tersebut terjadi karena belum ada perusahaan yang dapat dijadikan tempat produksi. Pemasaran rumput laut yaitu dari rumah produksi ke masyarakat biasa atau tengkulak yang biasanya membeli rumput laut. Tujuan dilakukanya bina usaha oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan perusahaan domestik di Makassar, Jakarta dan Surabaya adalah para petani dapat menjalankan pemasaran rumput lautnya dengan maksimal.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, penulis membuat kesimpulan yaitu:

1. Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan



Dimensi produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas diketahui telah berjalan dengan cukup baik, namun dari dimensi kualitas dan responsivitas belum berjalan dengan cukup baik.

2. Hambatan kinerja Dinas Pangan pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yaitu:
  - A. Kurangnya tenaga penyuluh di Dinas Pangan Pertanian dan perikanan;
  - B. Data Jumlah Petani Rumput Laut yang belum Valid;
  - C. Tidak adanya industri Pemasaran rumput laut
3. Upaya mengatasi hambatan kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan dalam pemberdayaan petani rumput laut Kota Tarakan yaitu:
  - A. Melakukan penambahan jumlah tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut.;
  - B. Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di kota Tarakan;
  - C. Melakukan Bina Usaha dengan Perusahaan Domestik.

## **SARAN**

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan perlu memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga penyuluh yang baru maupun tenaga penyuluh yang sudah ada. Dengan memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga penyuluh yang ada, maka akan memberikan kemudahan kepada para petani untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan dalam membudidayakan rumput laut yang berkualitas.
2. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan perlu melakukan sosialisasi kepada para petani rumput laut tentang pentingnya update data administrasi.
3. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan perlu membangun Industri pemasaran rumput laut di Kota Tarakan. Dengan membangun industri pemasaran rumput laut, maka kegiatan bina usaha dengan perusahaan domestik yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan usaha rumput laut dapat dikembangkan serta dapat menjangkau ke pasar nasional maupun internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fachrudin, Adi. 2012. Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Herdiansyah, Haris, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2017. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Silalahi dan Syafri. 2015. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik. Sumedang: IPDN Press.
- Soleh, Chabib dan Suropto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Wignyosoebroto Soetandyo Editor: Aziz Ali Moh, Rr Suhartini, A. Halim, 2009, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta: Pustaka Pesantren

### **B. Undang-Undang/Peraturan**

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038